

Draft publikasian

**PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 03:
LAPORAN ARUS KAS**

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

30 Oktober 2002



Kata Pengantar

Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah.

Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kita perlu membangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak. Upaya profesional yang independen yang telah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah—dengan dukungan berbagai lembaga terkait—telah tertuang pada naskah Draft Publikasian (*Exposure Draft*) ini yang terdiri dari (1) Kerangka Konseptual, (2) Penyajian Laporan Keuangan, (3) Pelaporan Realisasi Anggaran, dan (4) Pelaporan Arus Kas.

Tahun depan dan beberapa tahun seterusnya, Komite telah mengantisipasi kesibukan yang lumayan padat. Sederet standar akuntansi yang lebih terinci sudah menunggu untuk dikembangkan. Termasuk di antara yang mendesak adalah Standar Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Utang Pemerintah, dan Standar Akuntansi Proyek Investasi.

Dalam penyusunan Draft Publikasian ini, digunakan berbagai acuan sebagai bahan bandingan, terutama standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang diterbitkan oleh *Public Sector Committee dari International Federation of Accountants (IFAC)*,

manual *Government Finance Statistics Manual* dari *International Monetary Fund (IMF)*, standar akuntansi yang diberlakukan oleh *Government Accounting Standards Board (GASB)* maupun oleh *Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB)* di Amerika Serikat, dan juga standar akuntansi yang telah berlaku di lingkungan komersial terbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Draft Publikasian ini sengaja disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari berbagai pihak sebagai masukan bagi perbaikan draft ini. Praktisi, akademisi, dan khalayak pengguna informasi dinantikan partisipasinya, sehingga keinginan untuk mewujudkan standar akuntansi yang layak di lingkungan pemerintah dapat diwujudkan dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Jakarta, 30 Oktober 2002

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Draft Publikasian ini diterbitkan oleh **Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah** dan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 5 Desember 2002.

([Form Tanggapan](#))

Tanggapan dikirimkan ke:

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Gedung BAPEKSTA Lantai 8, Departemen Keuangan
Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, 10710
Telepon/Facsimile 3443009

Email ppsapa@centrin.net.id

Salinan dari Draft Publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Penggandaan Draft publikasian ini oleh individu atau organisasi/lembaga dianjurkan dan diijinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 03:
LAPORAN arus kas**

DRAFT PUBLIKASIAN

Daftar Isi

PENDAHULUAN	1 - 10
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	3 - 4
Manfaat Informasi Arus Kas	5 - 7
Definisi	8
Kas dan Setara Kas	9 - 10
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS	11 - 12
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS	13 - 30
Aktivitas Operasi	17 - 21
Aktivitas Investasi	22 - 24
Aktivitas Pembiayaan	25 - 27
Aktivitas Nonanggaran	28 - 30
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN NON ANGGARAN	31 - 33
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH ARUS KAS MATA UANG ASING	34
POS LUAR BIASA	35 - 37
BUNGA DAN BAGIAN LABA	38 - 39
INVESTASI DALAM ENTITAS KENDALIAN DAN	

KEMITRAAN	40 - 43
PEROLEHAN DAN PELEPASAN ENTITAS KENDALIAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA	44 - 45
TRANSAKSI BUKAN KAS	46 - 49
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS	50 - 51
PENGUNGKAPAN LAINNYA	52
TANGGAL EFEKTIF	53 - 55
PERSYARATAN MASA TRANSISI	56
	57 - 58

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI**
2 **PEMERINTAH**
3 **NO. 03**
4 **LAPORAN ARUS KAS**

5

6 *Pernyataan standar yang dicetak dengan tipe huruf tebal dan miring harus*
7 *dibaca dalam konteks paragraf penjelas dalam standar ini. Paragraf penjelas*
8 *dicetak dengan huruf biasa. Standar Akuntansi Pemerintah tidak diterapkan*
9 *untuk pos-pos yang tidak material.*

10

11 **PENDAHULUAN**

12 **Tujuan**

- 13 1. Tujuan standar laporan arus kas adalah memberikan informasi historis
14 mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pemerintah melalui
15 laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
16 investasi, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.
- 17 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,
18 penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan
19 saldo kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
20 pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

1 Ruang Lingkup

- 2 3. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan
3 standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan
4 dari laporan keuangan lainnya untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
- 5 4. *Standar ini diterapkan dalam penyusunan laporan arus kas pemerintah*
6 *pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah*
7 *pusat/daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan*
8 *perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat*
9 *laporan arus kas.*

10 Manfaat Informasi Arus Kas

- 11 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator terhadap jumlah dan kepastian
12 arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
13 taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- 14 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan
15 arus kas keluar selama periode pelaporan.
- 16 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
17 memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
18 mengevaluasi perubahan aset bersih/ekuitas dana suatu entitas dan struktur
19 (termasuk likuiditas dan solvabilitas) keuangan pemerintah.
- 20

21 Definisi

- 22 8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini:
- 23 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh*
24 *pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*
25 *ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh*

1 pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
2 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
3 jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber
4 daya karena alasan sejarah dan budaya.

5 Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.

6 Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
7 ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
8 akuntansi.

9 Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap
10 dan aset lainnya yang tidak masuk dalam aset lancar.

11 Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
12 yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas
13 dana dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit dan surplus
14 anggaran.

15 Aktivitas nonanggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang
16 tidak mempengaruhi anggaran pemerintah.

17 Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) adalah entitas
18 kendalian pemerintah dan merupakan kekayaan negara/daerah yang
19 dipisahkan dengan karakteristik sebagai berikut:

- 20 (a) Merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah
21 pusat dan daerah.
- 22 (b) Mempunyai otoritas penuh dalam melakukan operasional dan
23 pengelolaan keuangannya.
- 24 (c) Menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan
25 mengharapkan keuntungan dalam tingkat tertentu.
- 26 (d) Dikendalikan oleh pemerintah pusat atau daerah.

1 *Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang*
2 *mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran*
3 *bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh*
4 *pemerintah.*

5 *Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan*
6 *selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.*

7 *Entitas Kendalian adalah suatu entitas yang berada dibawah kendali*
8 *entitas lainnya. Entitas yang mengendalikan entitas lainnya dikenal*
9 *sebagai entitas pengendali.*

10 *Entitas ekonomi adalah suatu kelompok entitas yang terdiri dari satu*
11 *entitas pengendali dan satu atau lebih entitas kendalian.*

12 *Entitas pengendali adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih*
13 *entitas kendalian.*

14 *Kewajiban (liabilities) adalah utang masa kini dari suatu entitas, yang*
15 *timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya akan*
16 *menimbulkan arus keluar sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh*
17 *suatu entitas.*

18 *Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan*
19 *untuk membiayai kegiatan pemerintah.*

20 *Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang*
21 *mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan*
22 *bersama.*

23 *Kendali adalah kekuatan entitas untuk mengendalikan kebijakan*
24 *keuangan dan operasi entitas lainnya.*

25 *Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.*

26 *Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.*

1 *Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai*
2 *investasi berdasarkan harga perolehan.*

3 *Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai*
4 *investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut*
5 *kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas aset*
6 *bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang*
7 *terjadi sesudah perolehan awal investasi.*

8 *Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam*
9 *menyajikan laporan keuangan.*

10 *Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah*
11 *yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang*
12 *bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak*
13 *perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah.*

14 *Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah*
15 *yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.*

16 *Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah*
17 *yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.*

18 *Pos luar biasa adalah penerimaan atau pengeluaran yang timbul dari*
19 *peristiwa atau transaksi di luar aktivitas normal pemerintah yang tidak*
20 *diharapkan terjadi berulang dan berada diluar kendali pemerintah.*

21 *Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap*
22 *dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko*
23 *perubahan nilai yang signifikan.*

24 *Tanggal pelaporan adalah hari terakhir dari periode pelaporan.*

1 Kas dan Setara Kas

- 2 9. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka
3 pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas,
4 investasi tersebut harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang
5 dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena
6 itu, suatu investasi baru bisa disebut setara kas kalau investasi tersebut
7 mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang dari
8 tanggal perolehannya.
- 9 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
10 keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan
11 bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan
12 nonanggaran.

13 ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

- 14 11. *Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi*
15 *pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat*
16 *pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan*
17 *menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan, yang*
18 *terdiri dari:*
- 19 (a) *Pemerintah pusat;*
20 (b) *Pemerintah daerah; dan*
21 (c) *Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau*
22 *organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan*
23 *satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.*
- 24 12. *Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus*
25 *kas adalah unit organisasi yang memegang fungsi perbendaharaan.*

1 PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

2 **13.** *Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran*
3 *kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas*
4 *operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.*

5 14. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non
6 anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan
7 untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara
8 kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
9 hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.

10 15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas,
11 misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan
12 bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
13 pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam
14 aktivitas operasi.

15 16. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran 1 standar ini.
16 Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan bagian dari standar. Tujuan
17 lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu
18 dalam klasifikasi artinya.

19

20 **Aktivitas Operasi**

21 17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
22 kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
23 membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
24 mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

25 18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dari:

- 1 (a) Penerimaan Perpajakan;
2 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3 (c) Penerimaan Hibah;
4 (d) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
5 (e) Penerimaan Transfer
- 6 19. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama untuk pengeluaran operasional
7 pemerintah antara lain:
- 8 (a) Belanja Pegawai;
9 (b) Belanja Barang dan Jasa;
10 (c) Belanja Bunga dan Sewa;
11 (d) Belanja Hibah;
12 (e) Belanja Subsidi;
13 (f) Belanja Jaminan Sosial;
14 (g) Belanja Lain-lain; dan
15 (h) Belanja Transfer.
- 16 20. Jika suatu entitas pemerintah mempunyai surat berharga yang sifatnya sama
17 dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan
18 surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- 19 21. Jika entitas pemerintah mengotorisasikan dana untuk kegiatan operasional
20 suatu entitas lain, yang peruntukannya tidak jelas apakah sebagai modal kerja,
21 penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
22 pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
23 Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

24 **Aktivitas Investasi**

- 25 22. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
26 kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi

1 yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di
2 masa yang akan datang.

3 23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 4 (a) Penjualan Aset Tetap;
- 5 (b) Penjualan Aset Lainnya.

6 24. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- 7 (a) Perolehan Aset Tetap;
- 8 (b) Perolehan Aset Lainnya.

9 **Aktivitas Pembiayaan**

10 25. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
11 kas bruto sehubungan dengan defisit/surplus anggaran yang bertujuan untuk
12 memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas pemerintah di masa
13 yang akan datang.

14 26. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 15 (a) Penerimaan Pinjaman;
- 16 (b) Penjualan Obligasi Pemerintah;
- 17 (c) Hasil Privatisasi BUMN/BUMD; dan
- 18 (d) Penjualan Investasi Permanen Lainnya.

19 27. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 20 (a) Pembayaran Cicilan Utang;
- 21 (b) Pembayaran Obligasi Pemerintah; dan
- 22 (c) Penyertaan Modal Pemerintah.

1 **Aktivitas Nonanggaran**

- 2 28. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan
3 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas dari
4 aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan
5 Kiriman Uang. PFK menggambarkan arus kas yang berasal dari jumlah dana
6 yang dipotong dari Surat Perintah Membayar untuk pihak ketiga misalnya
7 potongan Taspen dan Askes.
- 8 29. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan
9 Kiriman Uang Masuk.
- 10 30. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan
11 Kiriman Uang Keluar.

12 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 13 **OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN NON** 14 **ANGGARAN**

- 15 31. *Entitas pemerintah harus melaporkan secara terpisah kelompok utama*
16 *penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,*
17 *pembiayaan, dan non-anggaran, kecuali yang tersebut dalam paragraf*
18 *34.*
- 19 32. *Entitas akuntansi dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi*
20 *dengan cara:*
- 21 *a) Metode Langsung.*
22 *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan*
23 *dan pengeluaran kas bruto.*
- 24 *b) Metode Tidak Langsung.*

1 *Dalam metode ini, surplus atau defisit dikoreksi dengan transaksi-*
2 *transaksi operasional nonkas, penerimaan-penerimaan pendapatan*
3 *dan pengeluaran-pengeluaran belanja tahun lalu/yang akan*
4 *datang, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang*
5 *berkaitan dengan aktivitas investasi dan pembiayaan.*

- 6 33. Entitas pemerintah pusat dan daerah sebaiknya menggunakan metode langsung
7 dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Adapun keuntungan
8 penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
- 9 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di
10 masa yang akan datang;
 - 11 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - 12 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
13 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

14 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS**

15 **BERSIH**

- 16 34. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar*
17 *arus kas bersih dalam hal:*
- 18 (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima*
19 *manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan*
20 *aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu*
21 *contohnya adalah hasil kerjasama operasional (KSO).*
 - 22 (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang*
23 *perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka*
24 *waktunya singkat.*

1 ARUS KAS MATA UANG ASING

- 2 35. *Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan*
3 *dengan menggunakan mata uang Rupiah dengan menjabarkan mata*
4 *uang asing tersebut ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada*
5 *tanggal transaksi.*
- 6 36. *Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pemerintah di luar negeri*
7 *harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada*
8 *tanggal transaksi.*
- 9 37. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs
10 mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

11 POS LUAR BIASA

- 12 38. *Arus kas dari kejadian-kejadian luar biasa yang timbul dari aktivitas*
13 *operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran harus diungkapkan*
14 *secara terpisah sesuai dengan sifat transaksinya.*
- 15 39. Arus kas yang timbul dari kejadian luar biasa diungkapkan secara tersendiri agar
16 para pengguna laporan arus kas dapat memahami sifat dan pengaruh kejadian
17 tersebut terhadap arus kas entitas pemerintah saat ini dan masa yang akan
18 datang.

19 BUNGA DAN BAGIAN LABA

- 20 40. *Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja*
21 *bunga serta penerimaan pendapatan dari bagian laba BUMN/BUMD*
22 *harus diungkapkan secara terpisah. Setiap perkiraan yang terkait*
23 *dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas*
24 *operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.*

1 41. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas
2 operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga
3 pada periode akuntansi yang bersangkutan.

4 42. Jumlah pengeluaran belanja bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas
5 operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode
6 akuntansi yang bersangkutan.

7 43. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba BUMN/BUMD yang
8 dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar
9 diterima dari bagian laba BUMN/BUMD dalam periode akuntansi yang
10 bersangkutan.

11 **INVESTASI DALAM ENTITAS KENDALIAN DAN** 12 **KEMITRAAN**

13 44. Pencatatan investasi pada entitas kendalian dan kemitraan dapat dilakukan
14 dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
15 Investasi pemerintah dalam entitas kendalian dan kemitraan dicatat dengan
16 menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

17 45. *Entitas harus melaporkan pengeluaran investasi dalam entitas kendalian*
18 *dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.*

19 **PEROLEHAN DAN PELEPASAN ENTITAS** 20 **KENDALIAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA**

21 46. *Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan entitas kendalian*
22 *dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam*
23 *aktivitas pembiayaan.*

-
- 1 47. *Entitas harus mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan entitas*
2 *kendalian dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang*
3 *diungkapkan adalah:*
- 4 *(a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*
5 *(b) Bagian pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan*
6 *setara kas;*
7 *(c) Jumlah kas dan setara kas pada entitas kendalian atau unit operasi*
8 *lainnya yang diperoleh dan dilepas; dan*
9 *(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas pada entitas*
10 *kendalian atau unit operasi lainnya.*
- 11 48. Penyajian terpisah arus kas dari entitas kendalian dan unit operasi lainnya
12 sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas
13 tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan,
14 dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan
15 dengan perolehan investasi lainnya.
- 16 49. *Aset dan utang selain kas dan setara kas dari entitas kendalian atau unit*
17 *operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan*
18 *hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau*
19 *utang oleh entitas kendalian atau unit operasi.*

20 **TRANSAKSI BUKAN KAS**

- 21 50. *Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan*
22 *pengeluaran kas dan setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas.*
23 *Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan*
24 *Keuangan.*
- 25 51. Pengecualian transaksi nonkas dari laporan arus kas konsisten dengan tujuan
26 laporan arus kas karena transaksi nonkas tersebut tidak mempengaruhi kas

1 periode yang bersangkutan. Contoh transaksi nonkas yang tidak mempengaruhi
2 laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

3 **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

4 52. *Entitas harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam*
5 *laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca.*

6 **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

7 53. *Entitas harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang*
8 *signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini harus*
9 *dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

10 54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas akan relevan bagi pengguna
11 laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas.

12 55. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan
13 arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas
14 entitas atau program dan informasi penganggaran pemerintah.

15 **TANGGAL EFEKTIF**

16 56. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah berlaku efektif untuk laporan*
17 *keuangan yang mencakup periode mulai tanggal 1 Januari 2004.*
18 *Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.*

19 **PERSYARATAN MASA TRANSISI**

20 57. *Semua ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah*
21 *berlaku sejak tanggal efektif. Entitas pemerintah harus menerapkan*
22 *seluruh ketentuan dalam pernyataan standar ini selambat-lambatnya 31*
23 *Desember 2004.*

1 58. Laporan keuangan konsolidasian belum diwajibkan untuk menggunakan
2 pernyataan standar ini sampai dikeluarkannya pernyataan standar yang
3 mengatur hal tersebut.

4

5

6

7

8

9

10